



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
UNIT KERJA : RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUDDY RISWANDHY NOORA
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 945175

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.570.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m²/10 m² di KAB / KOTA BANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 770.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m²/34 m² di KAB / KOTA BANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 760.000.000

1. MOTOR, YAMAHA BBS-R M/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000
2. MOBIL, MERCEDES BENZ C200 AT (W205) Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. MOBIL, HONDA HRV RU1 1,5 E PLUS CVT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. MOTOR, HONDA F1C02N28LO A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
5. MOTOR, YAMAHA SCOOTER Tahun 2023, HADIAH Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERTAGIH Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.395.808.743

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.725.808.743



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

4.725.808.743

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.